

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Anwar, Chairul. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*. Jakarta ; Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; PT Rineka Cipta.

Dikdik, Mohammad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional* ; Bandung.

Limbong, Bernhard. 2015. *Poros Maritim*. Jakarta ; Margaretha Pustaka.

Magdariza dan Ferdi. 2007. *Pengantar hukum laut*. Padang ; Andalas University Press.

Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta ; Sinar Grafika.

Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung ; PT. Alumni.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam dimensi hukum internasional*. Yogyakarta ; Graha Ilmu.

Harahap, Mustafa Djuang. 1983. *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*. Bandung ; PT. Alumni.

Hanitijo, Roni. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; Ghalia Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung ; PT. Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung ; Sumur Bandung.

Puspitawati, Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok ; Kencana.

Ria Siombo, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta ; PT. Raja Garfindo Persada.

Situmorang, Victor. 1987. *Sketsa Asas Hukum Laut*. Jakarta ; Bina Aksara.

Soejono, Wiwoho. 1993. *Hukum Pertanggungsaan Laut*. Jakarta ; PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.

Starke, JG. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta ; Sinar Grafika

Subagyo, Joko. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta ; PT. Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta ; PT. Raja Graffindo Persada.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.

Tirtamulia, Tjondro. 2011. *Zona – zona laut UNCLOS*. Surabaya ; Brilian Internasional.

B. JURNAL DAN ARTIKEL

Aditya Taufan Nugraha dan Irman. PNS Pada Biro Hukum Pemda Indragiri Hilir. 2014. *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara maritim*. Jurnal selat, Volume 2 No 1. hlm. 1.

Aldhanalia Pramesti Salsabila. Mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang. *Pengoptimalan satgas 115 dengan model koordinasi satgas pusat dan daerah sebagai bentuk pencegahan illegal transshipment di Indonesia*. *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 1, 2018, diakses tanggal 22 Maret 2019.

Berita Humas FHUI. *Kuliah Umum Hukum Laut Internasional “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia” oleh Laksamana Madya TNI Ane Soedewo, S.E, M.H (Kepala Badan Keamanan Laut RI)*, April 2018.

Moh. Iqbal. *Illegal Fishing sebagai kejahatan korporasi*. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Puslitbang Kumdil MA-RI*. Jl. A. Yani Kav. 58 Lt.10 Jakarta Pusat. Volume 1, Nomor 3 November 2012.

Ketut Darmika. Universitas Jayabaya. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (Kri) Dalam Perspektif Undang - Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 9, Nomor 1 November 2015.

Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2017.

Lucky Adrianto dalam *Implementation Code of Conduct for Responsible Fisheries* Dalam Perspektif Negara Berkembang, Jurnal Hukum Internasional, Volume 2 Nomor 3 April 2005, ISSN: 1693 – 5594. Jakarta. LPHI FHUI.

Raksasa tenggara. Youtube.com, Keamanan Laut Natuna dilengkapi pangkalan kapal selam. 2018.

Aji Sularso. *Fisheries & Cruising Consultant*. Transshipment Ikan. 2015. <http://ajisularso.com/transshipment-ikan>, diakses pada tanggal 28 September 2018.

Business Dictionary. *definition transshipment*, <http://www.businessdictionary.com/definition/transshipment> ,diakses pada tanggal 30 September 2018.

Dana Miller. Ilmuan kelautan di Oceana dan peneliti postdoctoral di University of British Columbia. Larangan transshipment di laut diperlukan untuk menahan perikanan ilegal. 2017. <http://www.iuuwatch.eu/2017/04/banning-transshipment-sea-necessary-curb-illegal-fishing-researchers-conclude/>, diakses 27 Januari 2019.

Fadhly Fauzi. detikFinance. Kapal Filipina dicituk di Perairan Sulawesi, <http://Fadhly-Fauzi-Rachman.detikFinance.com/2018/11/2-Kapal-Filipina-dicituk-diPerairan-Sulawesi>. Diakses pada 22 September 2018.

Fitriani Abdi. Penegakan hukum tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Fitrianiabdi@students.unnes.ac.id, 2018, diakses tanggal 29 Januari 2019.

Hadi Maulana. Kompas.com. 2018. Bakamla akui kekurangan kapal patroli untuk amankan laut. <https://regional.kompas.com/read/2018/05/31/12092901/bakamla-akui-kekurangan-kapal-patroli-untuk-amankan-laut-ri> , diakses 30 Januari 2019.

Jurnal maritim, Transshipment Hub dan Prospeknya di Selat Malaka, <http://asuransimarineindo.com/?p=2895> , diakses tanggal 20 Februari 2019.

Kamarudin Azis. TIME/ Zhang Chi/Beijing. 2018. Membatasi ruang gerak nelayan cina, <https://denun89.wordpress.com/2018/02/14/membatasi-ruang-gerak-nelayan-cina/>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2017. <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses tanggal 17 Maret 2019.

Konsep BPHN ke-2. Laporan penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan. 2006. https://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan_hk_diperairan_indonesia_dan_zona_tambahan.pdf, diakses tanggal 22 Maret 2019.

Maritime Cour. khusus penegakan hukum di laut, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55265b950a579/imaritime-court-i-khusus-penegakan-hukum-di-laut>, diakses 29 Januari 2019.

Munib Ansori. Wartawan harian ekonomi NERACA. KKP Tegaskan Moratorium dan Larangan Transshipment Tak Ganggu Ekspor - Sektor Perikanan, <http://www.neraca.co.id/article/53760/sector-perikanan-kkp-tegaskan-moratorium-dan-larangan-transshipment-tak-ganggu-ekspor>, diakses tanggal 17 Maret 2019.

Nathan Miller. *Pembelajaran mesin dan data satelit memberikan pandangan tentang aktivitas transshipment*. 2018, <https://skytruth.org/2018/07/machine-learning-and-satellite-data-provide-the-first-global-view-of-transshipment-activity/>, diakses tanggal 26 Januari 2019.

Novia sarinsimamora. Bisnis.com. Dampak larangan *transshipment* pada Dua Putra Utama Makmur. 2018, <https://market.bisnis.com/read/20180311/192/748500/larangan-transshipment-potensi-kerek-biaya-dua-putra-utama-makmur->, diakses tanggal 29 Januari 2019.

Suhardi. Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia. Disampaikan pada acara Coaching Clinic PPNS Perikanan Tahun 2013 Surabaya, 26 – 30 Mei 2013. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.htm>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Tri Listiyarini. Investor Daily Indonesia. Susi: Larangan *Transshipment* Tidak Bisa Ditawar Lagi, <https://id.beritasatu.com/agribusiness/susi-larangan-transshipment-tidak-bisa-ditawar-lagi/101608>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

Ulva Arieza. Okezone.com. *Selain ikan menteri Susi ungkap kapal ikan asing mencuri solar hingga 70 triliun rupiah*. <https://economy.okezone.com/read/2018/05/21/320/1900909/selain-ikan->

[menteri-susi-ungkap-kapal-asing-mencuri-solar-subsidi-hingga-rp70-triliun](#), diakses pada tanggal 19 September 2018.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Peraturan Internasional

Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Peraturan Perundang – undangan Nasional Indonesia

Undang – undang No 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982

Undang – undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang – undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang – undang No. 31 Tahun 2004 jo UU NO. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang – undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Menteri Nomor 57 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.